

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI, DAN KEBIJAKAN DESA PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Rima Melati ¹⁾, Muhammad Titan Terzaghi ²⁾

Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

rimalti.26@gmail.com ¹⁾, mtitan4@gmail.com ²⁾

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memutuskan dampak keterusterangan, tanggung jawab, kepentingan dan strategi kota terhadap administrasi peruntukan toko kota pada bantuan pemerintah daerah setempat. Strategi pemeriksaan yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan informasi tambahan dan penting yang diperoleh secara implisit melalui catatan dan langsung dari sumber pertama. Sampel penelitian melibatkan 90 responden dari penduduk desa Lais Utara, dan pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Analisis data menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 27. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa keterusterangan dalam mengawasi pendistribusian toko di kota sangat mempengaruhi bantuan pemerintah daerah. Selain itu, tanggung jawab dalam mengawasi distribusi cadangan kota juga mempengaruhi bantuan pemerintah daerah. Investasi daerah setempat tidak berdampak pada bantuan pemerintah daerah setempat. Sementara itu, strategi kota pada dasarnya mempengaruhi bantuan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Transparansi; Akuntabilitas; Partisipasi Masyarakat; Kebijakan Desa; Kesejahteraan Masyarakat*

Abstract

The purpose of this study is to determine the impact of sustainability, responsibility, importance and city strategy on the administration of city store designation on local government assistance. The examination strategy used is quantitative using additional and important information obtained implicitly through records and directly from the first source. The sample of the study involved 90 respondents from North Lais villagers, and data collection was carried out by questionnaire method. Data analysis using multiple linear regression method with the help of SPSS 27 software. The results of the exploration show that the directness in supervising the distribution of stores in the city greatly affects the assistance of local governments. In addition, the responsibility of overseeing the distribution of municipal reserves also affects local government assistance. Local investment has no impact on local government assistance. Meanwhile, the city's strategy essentially affects local government assistance.

Keywords: *Transparency; Accountability; Community Participation; Village Policy; Community Welfare*

PENDAHULUAN

Salah satu isu fundamental yang mendapat perhatian utama dari pemerintah di

History:

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 25 Desember 2023

Published: 26 Desember 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



berbagai negara adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tanpa perhatian serius terhadap hal ini, masalah ketidaksetaraan ekonomi dapat menghambat proses pembangunan dan transformasi, serta menimbulkan berbagai permasalahan keuangan di mata masyarakat. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia telah menemukan strategi untuk mengurangi kesenjangan perbaikan dengan memusatkan perhatian pada perbaikan di daerah provinsi (Emylia, 2019). Pengelolaan bagian toko kota yang baik sangat penting untuk mencapai kemajuan kota yang semakin maju. Pengelolaan bagian toko kota yang baik sangat penting untuk mencapai kemajuan kota yang semakin maju (Mualim & Maspaitella, 2021; Rahmad & Imantoro, 2022).

Program alokasi dana desa yang dijalankan dengan efisien secara tegas mempengaruhi bantuan pemerintah daerah dan dinamika pekerjaan daerah setempat dalam berbagai aspek pembangunan, kesehatan, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, serta upaya mempromosikan perdamaian, keadilan sosial, ekonomi, dan demokrasi di setiap desa di seluruh kabupaten di Indonesia, termasuk Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Program ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat. Dipercaya bahwa tingkat tanggung jawab dalam mengawasi penjabatan cadangan kota dan melaksanakan strategi kota dapat lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah sehubungan dengan pergantian peristiwa di tingkat provinsi. Desa Lais Utara adalah salah satu pemukiman di Kecamatan Lais yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin. Desa ini dibagi menjadi empat wilayah dusun, yakni Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV. Total penduduk Kota Lais Utara di Daerah Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, menghubungi 2.367 orang, dengan 780 kepala keluarga.

Berdasarkan informasi pada Tabel 2, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di kota Lais Utara telah berkembang selama beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam usaha untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, tercatat adanya peningkatan yang cukup besar dengan 152 penduduk yang terjebak dalam kondisi kemiskinan. Walaupun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dengan tambahan 112 penduduk miskin, namun situasinya tetap mengkhawatirkan. Pada tahun berikutnya, yaitu 2022, angka tersebut tidak menunjukkan perbaikan yang berarti dan bahkan ada tambahan sebanyak 140 penduduk miskin lagi.

Peningkatan ini kemungkinan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan dalam lapangan pekerjaan, keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi, serta dampak dari pandemi global yang mungkin telah berpengaruh signifikan terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat di desa Lais Utara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi dari berbagai lembaga, termasuk badan legislatif setempat, lembaga non-administratif, dan jaringan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang mendasari peningkatan jumlah

penduduk miskin tersebut, serta mengimplementasikan solusi- solusi berkelanjutan guna mengatasi masalah ini secara efektif di desa Lais Utara.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah entitas hukum yang terdiri dari desa adat dan dusun, atau disebut dengan istilah lain yang disebut sebagai Desa. Ini adalah elemen wilayah lokal dengan batas wilayah tertentu yang mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan penduduknya sesuai dengan dorongan wilayah setempat, kebebasan unik, atau hak-hak adat yang dirasakan dan dihormati dalam struktur pemerintahan. Kondisi Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis eksplorasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi kuantitatif, dengan sumber informasi esensial dan opsional. Dalam penjelajahan ini, titik fokus utama penelitian adalah Kota Lais Utara yang terletak di Kawasan Lais, Rezim Musi Banyuasin. Dalam penjelajahan ini, sumber informasi opsional adalah data yang diperoleh secara implisit, diambil dari berbagai sumber termasuk buku dan catatan yang membantu eksplorasi ini, dan informasi penting dalam penjelajahan ini diambil melalui penyampaian jajak pendapat secara langsung melalui Google dari kota Lais Utara. area lokal (Sugiyono, 2022). Populasi yang menjadi subjek eksplorasi adalah seluruh penghuni yang tinggal di Kota Lais Utara, yang berjumlah sebanyak 780 Kepala Keluarga. Pengujian yang dilakukan dalam eksplorasi ini menggunakan Purposive Examination dengan menggunakan resep Slovin, menggunakan *error tolerance* 10% atau 0,1, maka dihasilkan sampel $n = 780 / (1 + (780 \times 0,1^2))$ dihasilkan $n = 89$ dibulatkan 90 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Penggunaan Kajian terukur yang mencerahkan dalam eksplorasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pemahaman terhadap faktor-faktor eksplorasi, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kebijakan desa. Dalam penelitian ini digunakan tabel recurrence conveyor yang menunjukkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi (deviasi standar), serta cakupan kualitas terbesar dan terkecil untuk setiap penanda yang menjadi titik fokus penelitian (Ghozali, 2018).

Dalam eksplorasi ini terdapat berbagai penjelasan yang dikomunikasikan dalam skala Likert untuk setiap variabel. Pernyataan-pernyataan ini terkait dengan variabel independen, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kebijakan desa. Di sisi lain, variabel dependen mencakup pernyataan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, terdapat 19 pernyataan yang terbagi sebagai berikut: ada 3 pernyataan yang merepresentasikan variabel transparansi, 3 penjelasan pada variabel tanggung jawab, 4 penjelasan pada variabel kerjasama, 4

Rima Melati ¹⁾, Muhammmad Titan Terzaghi ²⁾, **Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Dan Kebijakan Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

penjelasan pada variabel strategi kota, dan 5 penjelasan pada variabel bantuan pemerintah daerah. Responden didekati untuk menilai pernyataan ini melalui survei yang diberikan, dengan menggunakan skala estimasi Likert yang terdiri dari skor 1 sampai 5. Setiap skor memiliki interpretasi sebagai berikut: skor 1 = sangat tidak setuju, skor 2 = tidak setuju, skor 3 = netral, skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju. Hasil analisis statistik deskriptif untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

		Statistics				
		Transparansi	Akuntabilitas	Partisipasi	Kebijakan Desa	Kesejahteraan Masyarakat
N	Valid	90	90	90	90	90
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		11,96	11,73	15,40	15,83	19,56
Std. Deviation		1,860	1,701	2,355	2,395	2,584
Minimum		6	7	6	10	14
Maximum		15	15	20	20	25

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sebagai berikut:

Dari data yang telah diberikan, variabel Transparansi (X1) dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai terkecil (minimum) adalah 6, sementara nilai tertinggi (maksimum) adalah 15. Rata-rata nilai transparansi adalah 11,96, dan deviasi standar dari data transparansi adalah 1,860.

Dari data yang telah diberikan, variabel Akuntabilitas (X2) dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai terkecil (minimum) adalah 7, sementara nilai tertinggi (maksimum) adalah 15. Rata-rata nilai transparansi adalah 11,73, dan deviasi standar dari data akuntabilitas adalah 1,701.

Dari data yang telah diberikan, variabel Partisipasi (X3) dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai terkecil (minimum) adalah 6, sementara nilai tertinggi (maksimum) adalah 20. Rata-rata nilai transparansi adalah 15,40 , dan deviasi standar dari data partisipasi adalah 2,355.

Dari data yang telah diberikan, variabel Kebijakan Desa (X4) dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai terkecil (minimum) adalah 9, sementara nilai tertinggi (maksimum) adalah 20. Rata-rata nilai kebijakan desa adalah 15,83, dan deviasistandar dari data kebijakan desa adalah 2,395.

Dari data yang telah diberikan, variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai terkecil (minimum) adalah 7, sementara nilai tertinggi (maksimum) adalah 20. Rata-rata nilai transparansi adalah 14,31, dan deviasi standar dari data transparansi adalah 2,866.

1) Uji Kualitas Data Uji Validitas

Pengujian legitimasi digunakan untuk menilai hubungan antara skor yang diperoleh dari setiap penyelidikan dan skor keseluruhan secara umum. Untuk menilai validitas, kita memeriksa nilai sig uji korelasi (r) dalam hasil output dari program statistik seperti SPSS. Suatu penyelidikan dalam jajak pendapat dianggap penting jika nilai hubungan yang ditentukan (ditentukan r) lebih besar daripada nilai hubungan yang tercantum dalam tabel (r tabel). Sebaliknya, Dengan asumsi nilai koneksi yang ditentukan (r hitung) lebih kecil dari nilai yang tercatat dalam tabel (r tabel) dengan tingkat sig $\alpha = 0,05$, maka dianggap pertanyaan-pertanyaan dalam survei tersebut tidak valid. Mengingat konsekuensi dari pengujian legitimasi, maka dapat beralasan bahwa semua instrumen mempunyai nilai keterkaitan $> 0,207$ (r tabel) dan nilai signifikansi (2-tailed) untuk semua item korelasi di bawah 0,05. Oleh karena itu, hal itu bisa terjadi diasumsikan bahwa semua pernyataan dalam jajak pendapat tersebut dianggap sah (Ghozali, 2018).

2) Uji Reabilitas

Uji kualitas yang tidak tergoyahkan digunakan untuk mensurvei sejauh mana informasi yang dikumpulkan stabil. Pengujian ketergantungan jajak pendapat menggunakan persamaan *alpha Cronbach*. Suatu variabel dianggap memiliki ketergantungan yang tinggi jika nilai Cronbach's alpha berikutnya lebih besar dari 0,60 (Sugiyono, 2022). Hasil dari uji reabilitas ini menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,656. Variabel akuntabilitas memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,838. Variabel partisipasi memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,723. Variabel kebijakan desa memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,664. Sementara itu, variabel kesejahteraan masyarakat memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,759. Semua variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa instrumen yang dipakai dalam penelitian ini dianggap memiliki reliabilitas yang baik.

3) Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji kenormalan dilakukan untuk menilai apakah kedua faktor dalam model relaps, khususnya variabel terhubung dan faktor bebas, mengikuti sirkulasi yang khas atau tidak (Ghozali, 2018). Dalam ulasan ini, uji kewajaran dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk mensurvei apakah informasi yang digunakan memiliki penyebaran yang khas. Kriteria pengujian normalitas adalah bahwa nilai signifikansi (Sig) harus lebih besar dari 0,05. Keputusan diambil berdasarkan (a) apabila nilai Sig $\geq 0,05$ maka informasi dianggap rutin beredar, dan (b) apabila nilai Sig $< 0,05$ maka informasi tersebut dianggap jarang disampaikan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,20 dengan nilai signifikansi 0,20, lebih besar dari 0,05. Dengan cara ini, cenderung diasumsikan bahwa nilai yang tersisa memiliki

sebaran biasa dan dapat digunakan dalam penelitian.

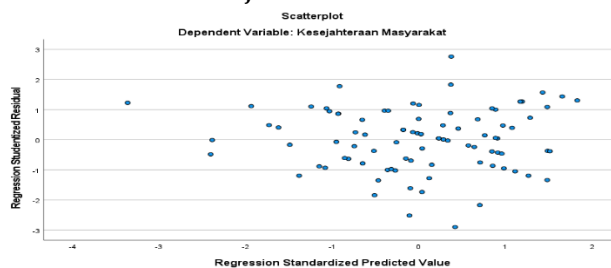
4) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menentukan apakah ada korelasi yang signifikan antara variabel bebas dalam model regresi. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,10, maka dapat dianggap bahwa model tersebut tidak mengalami masalah multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian. Konsekuensi dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua faktor bebas mempunyai nilai VIF di bawah 10 dan nilai Fleksibilitas lebih dari 0,10. Oleh karena itu, model ini dapat diasumsikan tidak menemui permasalahan multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

5) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai apakah model regresi mengalami ketidaksetaraan dalam variasi dari sisa antara satu persepsi dengan persepsi lainnya. Model backslide yang ideal adalah model yang tidak memberikan indikasi heteroskedastisitas. Pada pengujian ini, strategi yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah melalui pengujian realistik scatterplot.

Tabel 3. Uji heteroskedastiditas



Sumber : Data diolah, 2023

Dari tabel 3 yang telah disajikan, dapat diasumsikan bahwa tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas dalam model relaps yang dibingkai dalam tinjauan ini. Secara keseluruhan model tersebut menunjukkan homoskedastisitas. Hal ini terlihat dari grafik yang menunjukkan sebaran fokus di atas dan di bawah tidak ada fokus berbeda yang berkumpul dalam peluruhan titik pusat. Bintik-bintik tersebut juga hilang sembarangan dan tidak memberikan contoh yang jelas.

B. Analisis Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b						
Model	R	Adjusted R	Std. Error	Change Statistics	Dobis	

Rina Melati ¹⁾, Muhammad Titan Terzaghi ²⁾, **Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Dan Kebijakan Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

	R	Square	Square	of the	R Square	F	df1	df2	Sig. F	Watson
				Estimate	Change	Change			Change	
1	,574 ^a	0,329	0,298	2,165	0,329	10,435	4	85	0,000	1,745
a. Predictors: (Constant), Kebijakan Desa, Akuntabilitas, Partisipasi, Transparansi										
b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat										

Sumber : Data diolah, 2023

Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai *R Square* adalah 0,574, yang mengindikasikan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kebijakan desa bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 57,4% terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sisanya, sekitar 42,6%, dipengaruhi oleh berbagai elemen yang bukan merupakan titik fokus pemeriksaan ini.

2) Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5. Hasil Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,946	2,256		4,851	0		
	Transparansi	0,444	0,141	0,319	3,136	0,002	0,762	1,313
	Akuntabilitas	-0,304	0,14	-0,2	-2,167	0,033	0,926	1,08
	Partisipasi	0,06	0,11	0,054	0,542	0,589	0,787	1,271
	Kebijakan Desa	0,376	0,114	0,349	3,297	0,001	0,706	1,417
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat								

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pada tabel 5 dapat di implementasikan sebagai berikut: (1) Pengaruh X1 terhadap Y adalah $0,002 < 0,05$ dan nilai $t \ 3,136 > t$ tabel 1,988 sehingga dapat disimpulkan H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh terhadap Y. (2) Pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,03 < 0,05$ dan nilai t hitung $-2,167 < t$ tabel 1,988 sehingga dapat disimpulkan H2 diterima yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. (3) Pengaruh X3 terhadap Y adalah $0,589 > 0,05$ dan nilai $t \ 0,542 < t$ tabel 1,988 sehingga dapat disimpulkan H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap Y. (4) Pengaruh X4 terhadap Y adalah $0,001 < 0,05$ dan nilai $t \ 3,297 > t$ tabel 1,988 sehingga dapat disimpulkan H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh terhadap Y.

3) Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

Rima Melati ¹⁾, Muhamad Titan Terzaghi ²⁾, **Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Dan Kebijakan Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

1	Regression	195,696	4	48,924	10,435	,000 ^b
	Residual	398,526	85	4,689		
	Total	594,222	89			
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat						
b. Predictors: (Constant), Kebijakan Desa, Akuntabilitas, Partisipasi,						

Sumber : Data diolah, 2023

Dari hasil pengujian yang tercantum dalam Tabel 6, Hal ini cenderung beralasan bahwa terdapat pengaruh kritis secara timbal balik antara keterusterangan (X1), tanggung jawab (X2), dukungan (X3), dan strategi kota (X4) adil dan jujur terhadap bantuan pemerintah daerah (Y) di Desa Lais Utara. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam tes ini adalah $\alpha = 0,05$, dengan tingkat peluang df1 (jumlah faktor - 1) = 4 dan df2 (jumlah pengujian - jumlah faktor) = 86. Berdasarkan nilai dalam tabel F, diperoleh nilai f tabel sebesar 2,475. Dalam perbandingan antara f hitung dan f tabel, ditemukan bahwa f hitung > f tabel, yaitu $10,435 > 2,475$. Dengan cara ini, dapat beralasan bahwa secara bersama-sama (sementara), keterusterangan, tanggung jawab, dukungan dan strategi kota berdampak pada bantuan pemerintah di wilayah setempat di Kota Lais Utara.

C. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a												
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence		Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	10,946	2,256		4,851	0,000	6,459	15,432						
Transparansi	0,444	0,141	0,319	3,136	0,002	0,162	0,725	0,438	0,322	0,279	0,762	1,313	
Akuntabilitas	-0,304	0,140	-0,200	-2,167	0,033	-0,583	-0,025	-0,045	-0,229	-0,193	0,926	1,080	
Partisipasi	0,060	0,110	0,054	0,542	0,589	-0,159	0,278	0,279	0,059	0,048	0,787	1,271	
Kebijakan Desa	0,376	0,114	0,349	3,297	0,001	0,149	0,603	0,474	0,337	0,293	0,706	1,417	

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Data diolah, 2023

$$Y = 10.946 + 0,444 (X1) - 0,304 (X2) + 0,060 (X3) + 0,376 (X4) + e$$

Hasil Persamaan regresi berganda diatas memberikan pengertian bahwa:

1. Nilai konstanta (a) memiliki nilai sebesar 10.946, merupakan keadaan dimana variabel bantuan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu variabel keterusterangan (X1), variabel akuntabilitas (X2), variabel partisipasi (X3), dan variabel kebijakan desa (X4). Apabila faktor bebas tidak ada maka variabel bantuan pemerintah daerah tidak berubah.
2. b1 (nilai koefisien regresi (X1) sebesar 0,444, menunjukkan bahwa variabel transparansi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, yang berarti bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat seiring dengan peningkatan transparansi.

3. b2 (nilai koefisien regresi (X2) sebesar -0,304, menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat
4. b3 (nilai koefisien regresi (X3) sebesar 0,060, menunjukkan bahwa variabel partisipasi tidak mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. b4 (nilai koefisien regresi (X4) sebesar 0,376, menunjukkan bahwa variabel kebijakan desa mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang artinya semakin baik kebijakan desa maka semakin baik pula kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh transparansi pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan uji spekulasi yang telah dilakukan di atas dapat diketahui bahwa variabel keterusterangan (X1) mempunyai t hitung $>$ t tabel, spesifiknya $3,136 > 1,988$ dan nilai kepentingan sebesar $0,002$, dimana nilai pentingnya Nilainya lebih kecil dari $0,05$, sehingga cenderung diasumsikan bahwa variabel keterusterangan mempengaruhi bantuan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keterusterangan dalam mengawasi bagian cagar kota tercermin dalam aksesibilitas dan kemudahan akses terhadap laporan. Dalam situasi ini, pemerintah kota memberikan kesempatan kepada daerah setempat untuk mendapatkan data tentang kelancaran pemanfaatan anggaran kota. Selain itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi terkait keuangan dan non-keuangan, pemerintah desa memanfaatkan berbagai media lain untuk menyampaikan informasi yang penting kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan banyaknya tanggapan responden yang menjawab setuju dan tegas menyetujui setiap alamat yang diberikan.

Transparansi mengacu pada tingkat keterbukaan dalam menyediakan informasi oleh pemerintah desa tentang masalah keuangan dan kebijakan desa. Informasi ini harus dapat diakses dengan mudah oleh baik masyarakat umum maupun oleh pihak berwenang yang memerlukan informasi tersebut (Dura, 2018). Keterusterangan menyiratkan bahwa setiap penduduk mempunyai kebebasan dan kesempatan yang setara untuk memahami proses rencana pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan dan asumsi daerah setempat, khususnya dalam memenuhi persyaratan penting dalam mengawasi penetapan cagar kota (Putra & Rasmini, 2019).

Hal ini di dukung penelitian menurut (Dewi et al., 2018; Ismawati, 2016; Jaa et al., 2020; PUSIDA et al., 2021; Putri & Maryono, 2022) yang menemukan bahwa ada hubungan positif dan besar antara tingkat keaslian dan bantuan pemerintah ekologis, dan itu berarti bahwa semakin tinggi tingkat keterusterangan, semakin tinggi pula tingkat bantuan pemerintah lingkungan.

B. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan uji spekulasi yang telah dilakukan di atas dapat diketahui bahwa variabel tanggung jawab (X2) mempunyai t hitung yang ditentukan $> t$ tabel, yaitu $-2,167 > 1,988$ dan nilai kepentingannya sebesar 0,033, dimana nilai pentingnya adalah lebih kecil dari 0,05 sehingga cenderung. Kesimpulannya variabel tanggung jawab mempengaruhi bantuan pemerintah daerah. Artinya semakin tinggi nilai variabel tanggung jawab maka bantuan pemerintah daerah secara umum akan semakin berkurang. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas para eksekutif cadangan kota yang diberkahi. Dipercayai bahwa tanggung jawab akan bekerja pada sifat pelaksanaan pemerintah kota sehingga para eksekutif toko kota akan berubah menjadi bagian dari kepercayaan daerah setempat. Kepercayaan ini akan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa, memungkinkan masyarakat desa untuk mandiri, dan akhirnya mencapai status desa mandiri (Khasanah & Marisan, 2022).

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab diakui dengan memasang panji pernyataan yang berisi laporan tentang pemanfaatan cadangan kota di koridor kota terdekat. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun, di Desa Lais Utara, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, ada fenomena di mana meskipun akuntabilitasnya sudah baik, masyarakat tidak merasakan manfaat dari upaya tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masyarakat desa, yang mayoritas adalah petani, mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana mekanisme pelaporan dan penggunaan dana desa berfungsi. Kedua, mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak perlu terlalu memperhatikan laporan realisasi penggunaan dana desa karena mereka mempercayakan pengelolaan sepenuhnya kepada pemerintah kota sebagai agen mereka. Tanggung jawab hanya dirasakan oleh masyarakat yang langsung terlibat dalam pengawasan cagar kota dan berperan dalam pendistribusian cagar kota (perencanaan), serta oleh para pemimpin yang terkait dengan pengurus toko kota.

Meskipun konsekuensi penelitian ini tidak sesuai dengan pemeriksaan yang dipimpin (Kuswanti & Kurnia, 2020; Oktavia, 2020; Putra & Rasmini, 2019) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan berbeda dengan penelitian ini dimana akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan. Tetapi variabel akuntabilitas ini berkaitan dengan *Agency Theory*, mengingat tanggung jawab tersebut merupakan suatu jenis tanggung jawab dari para ahli (pemerintah kota) atas pelaksanaan organisasi pemerintahan kota kepada kepala (wilayah setempat kota). Dengan cara ini, laporan tanggung jawab tidak secara langsung mempengaruhi penguatan wilayah setempat.

C. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat

Dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diharapkan variabel spekulasi (X3) memiliki t yang ditentukan tidak seluruhnya lebih rendah dari nilai t tabel, yaitu $0,589 < 1,988$. Tingkat signifikansinya adalah 0,589, lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa variabel bantuan tidak mempengaruhi seberapa besar bantuan pemerintah daerah. Partisipasi dari seluruh bagian masyarakat di setiap wilayah desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang mengakomodasi kebutuhan khusus desa tersebut. Yang utama adalah keterlibatan dari seluruh warga, yang merupakan pihak yang memiliki hak atas kedaulatan negara ini (Mentari Tumbel, 2017).

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dapat menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketidakaktifan masyarakat dalam mengikuti proses pengelolaan keuangan desa dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat. Prinsip partisipatif adalah konsep di mana hak, aspirasi, dan ide-ide masyarakat dapat diwujudkan. Melalui keterlibatan mereka, mereka memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan keuangan desa. Ini juga melibatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap program-program yang dijalankan sebagai bagian dari realisasi pengelolaan keuangan desa yang telah diterimanya (Dewi et al., 2018).

Penelitian ini sejalan dengan (Dewi et al., 2018; Luthfiana, 2021; Mahardika & Terzaghi, 2020; Merina et al., 2018) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dalam setiap program pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam rapat-rapat masih terbilang rendah. Peserta yang aktif menghadiri rapat-rapat ini biasanya terdiri dari staf-staf desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan hanya sedikit dari masyarakat umum yang turut berpartisipasi.

D. Pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan desa (X4) mempunyai t hitung determinasi yang lebih tinggi dari nilai t tabel yaitu $3,297 > 1,988$. Nilai kepentingannya adalah 0,001, yang lebih rendah dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor strategi kota berdampak pada tingkat bantuan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lais Utara telah berhasil mengenali peluang-peluang dan mengatur strategi kebijakan yang benar sehingga masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan.

Adanya dampak positif dari strategi kota terhadap bantuan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi kota mengalami kemajuan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini karena kebijakan desa dirancang untuk memberikan tujuan yang jelas untuk semua aktivitas dan program yang ada di desa. Pembuatan kebijakan desa didasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada di desa

dengan tujuan mengurangi atau mengatasi masalah tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa. Pertama, realisme mempunyai nilai t nilai yang ditentukan $> t$ tabel, tepatnya $3,136 > 1,988$ dan nilai signifikansi sebesar $0,002$, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari $0,05$, sehingga diharapkan variabel keikhlasan berdampak pada bantuan pemerintah terdekat. Kedua, Kewajiban mempunyai nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $-2,167 > 1,988$ dan nilai signifikansi sebesar $0,033$, dimana nilai signifikansinya lebih kecil dari $0,05$ sehingga dapat diasumsikan bahwa variabel kewajiban berpengaruh terhadap bantuan pemerintah daerah. Ketiga, Partisipasi mempunyai nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $0,589 < 1,988$ dan nilai signifikansi sebesar $0,589$, dimana signifikansi nilai lebih besar dari $0,05$ sehingga diduga variabel bantuan berpengaruh terhadap lingkungan. bantuan pemerintah lingkungan. Keempat, Metodologi kota mempunyai nilai t hitung $> t$ tabel, tepatnya $3,297 > 1,988$ dan nilai signifikansi sebesar $0,001$, dimana nilai signifikansinya lebih kecil dari $0,05$, sehingga diharapkan faktor sistem kota berdampak pada lingkungan sekitar. bantuan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, F. G. R., Sapari, & Dura, J. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Dura, J. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Emylia, L. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ismawati, A. (2016). *Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Tengah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan.
- Jaa, E., Sulistyono, S., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237>
- Khasanah, A. N., & Marisan, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap

Rima Melati ¹⁾, Muhammad Titan Terzaghi ²⁾. **Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Dan Kebijakan Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

- Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 32–48. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–22.
- Luthfiana, K. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Semasa Pandemi Covid-19 pada Primkop Kartika Belibis Cakti Batalyon Arhanud 13 Pekanbaru* (Vol. 14, Issue 1).
- Mahardika, J. P., & Terzaghi, M. T. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran *Seminar Hasil Penelitian FEB*, 32, 24–37.
- Mentari Tumbel, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21.
- Merina, C. I., Verawaty, & Yolantari, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Bengkulu Selatan. *Semhavok*, 73–81.
- Mualim, M., & Maspaitella, M. R. (2021). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Pada Kampung Sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.36883/jfres.v4i1.50>
- Oktavia, N. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. *Skripsi*.
- PUSIDA, A., J.RARES, J., & MAMBO, R. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(62–65), 58–68.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688.
- Rahmad, S. D., & Imantoro, J. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Manajemen Diversifikasi*, 2(1), 208–215.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). CV. Alfabeta, Bandung.